



Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember

Siti Fatimah^{1*}, Siti Fatimah²

Akuntansi Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
fatimahsiti49625@gmail.com¹, stpatiem27@gmail.com²

Info Artikel	Abstrak
Masuk: 10 Februari 2024 Diterima: 14 Februari 2024 Diterbitkan: 21 Februari 2024 Kata Kunci: Sistem informasi, Kendala	Sistem ini bertujuan untuk memanfaatkan data yang ada serta bagaimana informasi keuangan, perencanaan, pengawasan dan pembangunan daerah. Terbentuknya sistem ini merupakan salah satu bentuk dari program dalam membantu masyarakat yang bertujuan untuk memberikan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat, dalam pelaksanaan SIPD Kabupaten Jember telah menyediakan data serta informasi secara akurat dan terintegrasi. Data serta informasi memiliki peran penting dalam upaya mencapai keberhasilan pembangunan di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong SIPD ini dengan menerbitkan beberapa payung hukum untuk mendukung pengadaan data serta informasi yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan perusahaan yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan ekonomi. Dalam setiap sistem tentunya terdapat kendala-kendala yang harus bisa diatasi oleh pengguna sistem.

PENDAHULUAN

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah sistem pendokumentasian, pengelolaan dan pengelolaan data perencanaan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada publik dan sebagai dokumen pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi kinerja pemerintahan daerah (Winarno et al., 2019). Tujuannya yaitu guna memanfaatkan data dan informasi pembangunan daerah dengan sebaik-baiknya. Sedangkan SIMDA Finance versi 2.7 merupakan aplikasi pengelolaan keuangan terintegrasi seperti penganggaran, pengelolaan bisnis, akuntansi, dan pelaporan. Penganggaran dilaksanakan dalam bentuk rencana kerja anggaran (RKA), rancangan APBD beserta perubahannya, dan dokumen pelaksanaan anggaran. Pengendalian bisnis meliputi surat pendanaan, surat permintaan pembayaran, perintah pembayaran, perintah pencairan, tanda terima setoran, serta register dan formulir pengendalian anggaran. Sedangkan akuntansi dan pelaporan meliputi jurnal, buku besar, buku besar pembantu, laporan keuangan, dan dokumen pertanggungjawaban PERDA beserta uraiannya.

Dengan dikeluarkannya Permendagri No. 77 Tahun 2020 yang otomatis menggantikan Permendagri sebelumnya yaitu Permendagri NO. 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Dan seluruh SKPD Kota jember termasuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota jember sudah tidak menggunakan aplikasi SIMDA lagi, melainkan telah menggunakan aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) yang diatur dalam Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. 1(dapus)

Berkembangnya dengan pesat SIPD memiliki pengaruh yang besar sehingga makin bernilai tinggi dalam sebuah organisasi. Sistem informasi saat ini dapat dijalankan secara online yang memudahkan penggunaannya untuk mengakses data dimana saja dan kapan saja. Dibangunnya sistem informasi dengan tepat akan memberikan sebuah gambaran kinerja organisasi yang akurat bagi penggunaannya dalam pengambilan keputusan suatu kebijakan. Hal tersebut yang saat ini dimanfaatkan oleh pemerintah untuk memantau perkembangan pemerintah dengan membangun sebuah sistem selain itu juga untuk meningkatkan program pembangunan di segala bidang terutama dalam finansial keuangannya.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut (UU No. 17, 2003). Untuk dapat menjalankan pemerintahan daerah dengan segala aspek keuangan yang terdapat didalamnya maka setiap kepala daerah harus dapat melakukan pengelolaan keuangan daerah yang baik sesuai dalam permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan daerah, yang menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah (Permendagri No. 13, 2006). 2(dapus).

Melihat Pentingnya Penerapan Pada Pengelolaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) menghasilkan laporan yang berkualitas maka tujuan dari penelitian ini Adalah Untuk mengetahui Bagaimana Penerapan Sistem Informasi Pemerintah

daerah (SIPD) Dalam Pengelolaan Keuangan yang berlaku di kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Jember Dan apakah terdapat kendala dalam proses pelaksanaan SIPD.

berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional, dengan tujuan menciptakan masyarakat yang berkembang, adil, dan sejahtera sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Dengan terlibat dalam program magang di area koperasi, mahasiswa memiliki kesempatan untuk secara aktif berpartisipasi serta mendalami mekanisme ekonomi rakyat melalui pengalaman langsung, yang mana mendukung aspirasi sosial dan ekonomi secara lebih luas. Dengan mengikuti Praktik Pengalaman Lapangan di Primkoppel/ Koperasi Konsumen Kepolisian Resort Jember, mahasiswa akan memperoleh pemahaman mendalam tentang dunia koperasi, termasuk pengelolaan dan tantangan yang dihadapi oleh koperasi tersebut. Sehingga, mahasiswa akan menjadi lebih cakap dalam berkontribusi pada koperasi, meningkatkan kesejahteraan anggotanya khususnya, dan Pegawai Negeri Sipil pada umumnya, sesuai dengan aspirasi koperasi. Dengan demikian, koperasi dapat efektif dalam perannya sebagai entitas ekonomi di Indonesia, terutama bagi anggota kepolisian dan pegawai negeri.

METODE

Metode penelitian jurnal ini menggunakan kualitatif deskriptif. Metode kualitatif ini, penulis yang menjadi instrumen dalam penelitian dan analisis dilakukan secara terus menerus dari awal penelitian hingga analisis data. Pengamatan langsung pada obyek sesuai lingkup penelitian dan teori sebagai pendukung penelitian berdasarkan lingkup pembahasan. Mengidentifikasi obyek-obyek yang ada pada lokasi penelitian meliputi, aspek informasi pembangunan daerah, aspek informasi pemerintahan daerah lainnya. Setelah data lapangan dan literatur didapat sesuai fokus penelitian maka proses analisis dilakukan untuk mendapatkan pengaruh dari adanya penerapan sistem informasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan sistem informasi Pemerintah daerah (SIPD) Dalam Pengelolaan Keuangan

Menurut Gordon B. Davis, Informasi adalah data yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang berguna dan realistis bagi penerimanya. Sedangkan menurut Barry E. Cushing : Informasi adalah hasil pengolahan data yang terorganisir dan berguna bagi orang yang menerimanya.

Menurut Stephen A. Moskowitz: Informasi sebagai kenyataan atau format berguna yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan bisnis. Alternatifnya, informasi dapat digambarkan sebagai hasil pengolahan data dalam bentuk yang lebih berguna bagi orang yang menerimanya dan dapat digunakan sebagai alat pengambilan keputusan.

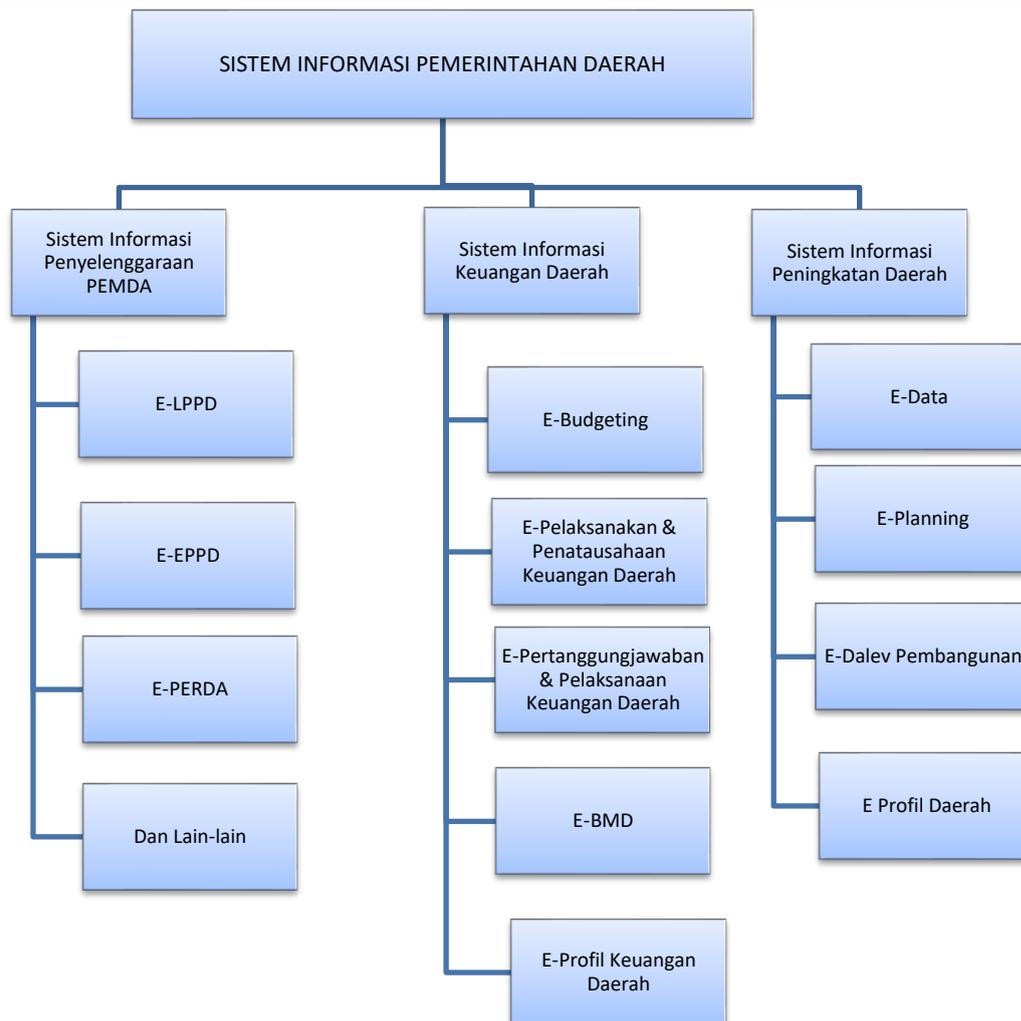
Terkait dengan percepatan pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) tersebut, Pemerintah Daerah wajib mengintegrasikan semua sistem terkait dengan informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah ke SIPD paling lama 1 (satu tahun) sejak diundangkannya Permendagri Nomor 70 Tahun 2019. Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Permendagri Nomor 70 Tahun 2019, Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas:

- Informasi Pembangunan Daerah;
- Informasi Keuangan Daerah.
- Selain Informasi Pembangunan Daerah dan Informasi Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan
- mengelola Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya.

Pengelolaan keuangan SIPD Kabupaten Jember terdapat beberapa hal, yaitu :

1. Perencanaan Keuangan, proses untuk mencapai tujuan seseorang melalui pengelolaan keuangan secara terencana, Jadi dengan menyusun RKA (Rencana Kerja Anggaran) meng-input data-data per Sub Kegiatan sesuai dengan kode rekening, sesuai dengan SLTB, dan pedoman pembebanan terhadap masing-masing item belanja barang dan jasa.
2. Input data, dilakukan oleh masing-masing bagian sesuai dengan kebutuhan pada tahun berikutnya.
3. Penyusunan anggaran kas, dalam per program, kegiatan, sub kegiatan atau dalam belanja anggaran kas.
4. Inputin pembayaran pembebanan terhadap pengelolaan barang dan jasa serta pajak (konfirmasi ke bagian keuangan)
5. Verifikasi keuangan sekretariat DPRD melalui SIPD meliputi: Verifikasi, Validasi, Dan inputing data untuk keperluan pembuatan SPM serta SPP.
6. Evaluasi dan laporan dilakukan secara general (umum) khususnya terkait dengan penyajian anggaran ditingkat DPD/Sekretariat DPRD.

Berikut contoh alur dalam sistem pemerintahan daerah



Dari contoh alur di atas dapat dijabarkan bahwa sistem informasi daerah dibagi menjadi 3 alur yaitu:

1. sistem informasi penyelenggaraan PEMDA terdiri dari beberapa alur yaitu:

- alur dari sistem informasi penyelenggaraan kemudian dilanjutkan dengan alur kedua yaitu E-LPPD. E-LPPD merupakan laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat mengenai kinerja dan pelaksanaan misi bantuan selama periode satu tahun. Data dan informasi yang disajikan oleh E-LPPD yaitu:
 - a. penjelasan umum daerah
 - b. pencapaian akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah
 - c. pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah
 - d. laporan penerapan penerapan serta pencapaian SPM
- E-EPPD merupakan laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat mengenai kinerja dan pelaksanaan misi bantuan selama periode satu tahun. Pemerintah melakukan EPPD yang meliputi EKPPD, EKPOD, dan EDOB.
 1. EKPPD dilakukan untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik.
 2. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Otonomi Daerah (EKPOD) yang dimuat dalam PP Nomor 8 Tahun 2008 menyatakan: “Tujuan akhir otonomi daerah tercermin dari tingginya parameter kualitas manusia yang diukur secara internasional melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam EKPOD, IPM dapat memperhitungkan faktor-faktor yang mengukur kemampuan mewujudkan otonomi daerah.” Oleh karena itu, IPM adalah idealnya merupakan indikator untuk mengukur kinerja dan hasil regional.
 3. EDOB dilakukan untuk memantau perkembangan perlengkapan aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah pada daerah yang baru dibentuk.

Data dan informasi yang disajikan oleh E-EPPD yaitu:

- a. Data dan informasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah (IKK output).
 - b. Data dan informasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah (IKK outcom).
- Alur yang ke empat yaitu E-PERDA merupakan sistem yang dapat memfasilitasi terciptanya perangkat hukum daerah menurut asas efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas, serta menjamin terbentuknya

- perangkat hukum daerah menurut asas desain, asas isi, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- Dan lain-lain.
2. sistem informasi keuangan daerah terdiri dari lima alur diantaranya yaitu:
 1. E-Budjeting merupakan Sistem penganggaran dengan aplikasi program komputer berbasis web yang memudahkan proses penyusunan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).
 2. E-pelaksanaan dan penata usahaan keuangan daerah merupakan suatu hal yang meliputi aktivitas yang menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menata usahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa
 3. E-Pelaksanaan & Penatausahaan Keuangan Daerah merupakan Suatu bentuk dokumentasi pelaporan keuangan dengan bukti penerimaan dan penggunaan dana yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 4. E-BMD merupakan Aplikasi berbasis web berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021. Sejak diperkenalkannya sistem E-BMD, 47 pemerintah daerah telah mengajukan surat permintaan penggunaan sistem: 5 pemerintah negara bagian, 21 pemerintah prefektur, dan 6 pemerintah kota.
 5. E-profil keuangan daerah merupakan segala hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, dan segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang dapat diubah menjadi milik daerah berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
 3. sistem informasi peningkatan daerah terdiri dari empat alur diantaranya yaitu:
 - E-data merupakan Sistem informasi kepegawaian daerah dengan kontrak kerja. Data ini digunakan untuk memantau dan mengevaluasi hasil pembangunan di berbagai bidang. Adanya Sistem Informasi Data Statistik Departemen (SIMDA STATISTIK) memudahkan pengelolaan seluruh kebutuhan data di atas. Hal ini memungkinkan hasil Sistem Informasi Data Statistik Sektoral (SIMDA STATISTIK) dapat digunakan sebagai landasan rencana pembangunan ke depan dan mendukung proses pengambilan keputusan para pengelola daerah.
 - E-planning merupakan Sebuah sistem aplikasi yang mendukung terciptanya dokumen perencanaan jangka menengah dan pendek yang dikembangkan oleh Pemerintah Kota Metropolitan Surabaya untuk mewujudkan rencana pembangunan yang harmonis dan bertanggung jawab.
 - E-Dalev Pembangunan merupakan Sistem informasi pelaporan pelaksanaan rencana kerja triwulan (RENJA) untuk memantau kinerja, pelaksanaan program dan anggaran di lingkungan pemerintahan.
 - E profil daerah merupakan suatu gambaran dari pemerintahan daerah tersebut.

Kelebihan dan Kekurangan SIPD dan SIMDA

Dalam setiap sistem tentunya memiliki beberapa aspek kelebihan serta kekurangan yang dapat memicu perkembangan dari sistem tersebut. Seperti halnya sistem yang digunakan oleh Pemerintahan daerah terutama Sekretariat DPRD Kabupaten Jember yang menggunakan sistem SIPD dan SIMDA, yang mana hal ini dapat memicu kinerja karyawan yang menggunakan sistem ini. Berikut adalah kelebihan serta kekurangan dari SIPD dan SIMDA yang dialami oleh bapak Iwan Kurniawa, S.H (Penata (III/c))selaku Staff bagian Perencana Ahli Muda di Sekretariat DPRD Kabupaten Jember :

Unsur	SIMDA	SIPD
Kelebihan	<ul style="list-style-type: none"> • Aplikasi mudah dipahami. • Lebih lengkap karena bisa tersajikan BKU sesuai pengembalian uang atau cek. • Buku pajak lebih terinci. • Kalau ada salah input bisa diperbaiki internal • Ada dokumen kendali 	<ul style="list-style-type: none"> • Online (aplikasi digunakan di wilayah indonesia) • Langkah-langkah pembuatan SPP/SPM lebih ringkas.
Kekurangan	<ul style="list-style-type: none"> • Belum online • Langkah-langkah pembuatan SPP/SPM masih Panjang / rumit. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penarikan cek tidak dimasukkan. • Apabila ada kesalahan input / lainnya harus lapor ke kemandagri dan perbaikan biasanya dalam jangka waktu yang lamanya. • Tidak ada dokumen kendali.

Adapun perbedaan antara SIMDA dan SIPD yaitu meskipun penggunaan SIMDA hanya berfokus pada pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan BMD, SIPD mencakup cakupan yang lebih luas: pembangunan daerah, keuangan daerah, dan informasi pemerintahan lainnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disampaikan kesimpulannya sebagai berikut:

Dalam hasil penelitian yang telah ditentukan menunjukkan bahwa suatu pemerintahan daerah wajib menyediakan beberapa informasi pemerintahan daerah diantaranya yaitu: informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah. Serta terdapat enam pengelolaan keuangan SIPD kabupaten Jember diantaranya:

4. Perencanaan keuangan
5. Input data
6. Penyusunan anggaran kas
7. Inputin pembayaran pembebanan terhadap pengelolaan barang dan jasa serta pajak (konfirmasi ke bagian keuangan)
8. Verifikasi keuangan secretariat DPRD melalui SIPD. Serta
9. Evaluasi dan laporan yang dilakukan secara general(umum) khususnya terkait dengan penyajian anggaran ditingkat DPD/Sekretariat DPRD.

Dan didalam Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember juga terdapat kelebihan serta kekurangan itu sendiri yang telah dialami oleh bapak Iwan Kurniawan, S.H selaku perencana ahli muda di sekretariat DPRD kabupaten Jember.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian jurnal ini. Terutama, kami berterima kasih kepada:

Dengan kolaborasi dan partisipasi aktif dari pihak Kantor Sekretariat DPRD JEMBER, yang telah ikut terlibat serta membantu dalam penyusunan jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Gade, Muhammad. (2005). *Teori Akuntansi*. Jakarta Timur. Almahira. Hal 13-14.
- Nurwani, Muhammad Irfan Nasution.(2021). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 9(2). <https://ojs.unimal.ac.id/jak/article/view/4577>
- Defitri, Siska Aulia. (2018). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah. *Jurnal Benefita*, 3(1). <https://ejournal.lldikti10.id/index.php/benefita/article/view/2376>
- Ruhana F. (2017) Pemanfaatan Sistem Informasi Pembangunan Daerah dalam Mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah di Indonesia *Jurnal Manajemen Pembangunan*, 4 (2), 95-190
- Andika, 1 H. Setiawan, A. E Feriyanto, D. & Afdhalluddin, A (2020) Bimbingan Teknis Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Studi Kasus Pada Bappeda Kabupaten Pringsewu) *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Ungu (ARDI KE UNGU) Universitas Aisyah Pringsewu*, 2(3), 144-147
- Aswati, S. Mulyan, N, Sagian, Y, & Syah. A 7. (2015) Peranan Sistem Informasi Dalam Perguruan Tinggi Amal Teknologi Dan Sistem Informasi, 1(2),
- Ridhanie Azhar (2012) Kinerja Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Tethadap Kualitas Pembangunan Manusia Universitas Lambung Mangkurat <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/JIPPL/article/view/786>